

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATU ANDI KABUPATEN WONOGIRI**

NASKAH PUBLIKASI



**OLEH :
PATREM JOKO PRIYONO**

**NIM : P.100060038
Program Studi : Magister Manajemen
Konsentrasi : Manajemen Sumber Daya Manusia**

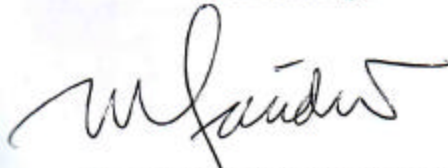
**MAGISTER MANAJEMEN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2015**

NASKAH PUBLIKASI

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN WONOGIRI**

Telah disetujui oleh

Pembimbing I



Dr. M. Farid Wajdi, MM, Ph.D

Pembimbing II



Dr. Ahmad Mardalis, MBA

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN WONOGIRI

Oleh
Patrem Joko Priyono¹, Farid Wajdi², dan Ahmad Mardalis³

¹)Mahasiswa Pascasarjana UMS

^{2), 3}) Dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelayanan aparat, akurasi wajib pajak, akurasi obyek pajak dan fasilitasi terhadap implementasi kebijakan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Wonogiri. Populasi diteliti dengan mengambil sampel wajib pajak sejumlah 100 orang responden. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang diukur dengan skala Likert. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan aparat tidak berpengaruh positif terhadap implementasi kebijakan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Wonogiri. Akurasi wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap implementasi kebijakan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Wonogiri, sedangkan akurasi obyek pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi kebijakan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Wonogiri. Sedangkan fasilitasi tidak berpengaruh positif terhadap implementasi kebijakan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Wonogiri. Pengujian secara simultan (Uji F) menunjukkan bahwa pelayanan aparat, akurasi wajib pajak, akurasi obyek pajak, dan fasilitasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Wonogiri. Pada Uji determinasi hasil regresi menunjukkan nilai adjusted R² sebesar 0,447. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 44,7% variable implementasi kebijakan pajak mineral bukan logam dan batuan dapat dijelaskan oleh variable pelayanan, akurasi data wajib pajak, akurasi data obyek pajak, dan fasilitasi sedangkan sisanya sebesar 55,3% dijelaskan oleh variable lain di luar variable penelitian.

Keyword : pelayanan, wajib pajak, obyek pajak, implementasi kebijakan, fasilitasi

Abstract

The purposed of the research to analyzed the influence of the officials service, the accuracy of tax payer data, the accuracy of object tax data, policy implementation and the facilitation toward tax income the non metal mineral and rock in Wonogiri Regency. This research use 100 tax payer as respondents. The technique of collecting data is using questionnaire with Likert scale. Data analysis using multiple regression analysis and classic assumption test. Result of this research indicate that the service of government officer do not have an effect on the positive to implementation of policy mineral lease non metal and rock. Taxpayer accuration do not have an effect on the positive to implementation of policy mineral loease non metal and rock, while accuration of obyect lease have an effect on positive and significant to implementation of policy mineral Iease non metal and rock. While facilitation do not have an effect on positive to implementation of policy of mineral Iease non metal and rock. Examination by simultan (test F) indicating that government officer service, taxpayer accuration, accuration of obyect Iease, and facilitate by simultan have an effect on the significant to implementation of policy mineral Iease non metal and rock.

Keyword: Officials services, tax payer, object tax, policy implementation, facilitation.

PENDAHULUAN

Paradigma baru pembangunan sekarang ini memberikan porsi seluas-luasnya kepada daerah dan masyarakat untuk mengelola kekayaan alamnya guna meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berimbang sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan menjadi salah satu faktor yang dapat meringankan beban pemerintah pusat dalam pelaksanaan pembangunan, namun pada kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Pada saat ini, sebagian besar kondisi keuangan pemerintah daerah masih sangat tergantung pada dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat, sehingga kondisi ini memacu pemerintah daerah selalu berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerahnya.

Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah telah mengatur sumber-sumber pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan murni dari daerah, terdiri-dari pajak daerah,

retribusi daerah, hasil dari perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah. PAD mempunyai peranan penting dalam keuangan daerah yang merupakan salah satu tolok ukur di dalam pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung-jawab kepada daerah secara proporsional.

Pemerintah Kabupaten Wonogiri, dalam era otonomi daerah, telah berupaya meningkatkan kesiapan dari segi keuangan daerah, diantaranya melaksanakan intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah khususnya dengan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Salah satu pajak daerah, sesuai dengan Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang perlu diupayakan untuk ditingkatkan adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Wonogiri diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Menurut Perda tersebut setiap orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan mineral bukan logam dan batuan wajib membayar pajak mineral bukan logam dan batuan yang besarnya ditetapkan 25% dari dasar pengenaan pajak (nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan).

Data penerimaan APBD selama 10 (sepuluh) tahun terakhir menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Wonogiri secara umum meningkat hampir 5 kali lipat. Dari tahun 2003 penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp96.940.214,- meningkat menjadi Rp 456.202.366,- pada tahun 2012.

Berdasarkan data dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2013 di atas menunjukkan bahwa selama sepuluh tahun terakhir hampir selalu memenuhi target pendapatan, kecuali pada tahun 2007 dan pendapatan selalu mengalami peningkatan. Dapat dikatakan bahwa pencapaian pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Wonogiri secara umum telah sesuai dengan harapan. Namun demikian bila dibandingkan dengan komponen PAD yang lain, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan masih kecil peranannya. Apalagi bila dibandingkan dengan

potensi pajak (produksi mineral bukan logam dan batuan), maka ternyata target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sangat tidak sebanding dengan potensi pajak yang dimiliki. Melihat kenyataan di atas perlu dilakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Wonogiri, baik menyangkut target maupun metode penagihan pajak tersebut, agar di masa mendatang sumber PAD ini dapat diupayakan lebih optimal.

Berbagai faktor perlu dianalisis agar dapat diketahui penyebab kurang optimalnya implementasi kebijakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Faktor pelayanan aparat pajak, faktor akurasi data wajib pajak, faktor akurasi data obyek pajak, dan faktor fasilitasi perlu diteliti apakah berpengaruh terhadap implementasi kebijakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh faktor pelayanan aparat pajak, akurasi data subyek pajak, akurasi data obyek pajak dan fasilitasi terhadap implementasi kebijakan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Wonogiri

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif asosiatif dengan pendekatan verifikatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 penambang dan pengguna mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Wonogiri dengan menggunakan teknik *purposive random sampling*.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Terdapat tiga variabel penelitian yaitu variabel bebas: 1) pelayanan aparat pajak (x_1), wajib pajak (x_2), obyek pajak (x_3) dan fasilitasi (x_4). Sedangkan variabel terikatnya adalah implementasi kebijakan (Y). Pengukuran variabel penelitian menggunakan skala *likert* dengan skala 5.

Untuk mengetahui apakah instrumen angket yang dipakai cukup layak digunakan sehingga mampu menghasilkan data yang akurat sesuai dengan tujuan ukurannya maka dilakukan uji validitas. Selain itu, untuk mengetahui konsistensi atau kepercayaan hasil ukur yang mengandung kecermatan pengukuran maka dilakukan uji reliabilitas.

Alat uji yang dipergunakan untuk menganalisis hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk melakukan prediksi bagaimana perubahan nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dinaikan/ diturunkan (Arikunto, 2002:149).

Analisis regresi linear berganda memerlukan uji persyaratan yang sangat ketat. Uji persyaratan pada regresi linear berganda biasa disebut dengan uji asumsi klasik. Persyaratan awal untuk menggunakan regresi adalah variabel penelitian harus diukur paling rendah dalam bentuk interval atau rasio. Persyaratan lainnya berupa uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, ujiautokorelasi, dan uji normalitas.

Data-data yang sudah dikumpulkan kemudian dilakukan uji hipotesis sebagai berikut: Analisis Koefisien Determinasi (R^2), Pengujian Hipotesis secara individual (Uji t), dan Pengujian Ketepatan Model (Uji F).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Instrumen

Uji instrumen merupakan pengujian awal yang dilakukan terhadap kuesioner sebagai alat pengumpul data yang meliputi uji validitas dan uji reliabilitas.

1. Uji Validitas

Tabel 1.
Hasil Uji Validitas Kuesioner Pelayanan Aparatur Pajak

Nomor Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan	Kesimpulan
Butir 1	0,463	0,195	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Butir 2	0,353	0,195	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Butir 3	0,625	0,195	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Butir 4	0,506	0,195	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Butir 5	0,500	0,195	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Butir 6	0,536	0,195	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Butir 7	0,530	0,195	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Butir 8	0,337	0,195	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid

Korelasi item-item pertanyaan terhadap variabel yang mempunyai nilai r_{item} lebih besar dari r_{tabel} merupakan item pertanyaan yang valid dalam menjelaskan variabelnya. Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa dari 8 item pertanyaan semua valid.

Tabel 2.

Hasil Uji Validitas Kuesioner Wajib Pajak				
Nomor Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan	Kesimpulan
Butir 1	0,664	0,195	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Butir 2	0,576	0,195	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Butir 3	0,768	0,195	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Butir 4	0,744	0,195	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Butir 5	0,808	0,195	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Butir 6	0,553	0,195	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Butir 7	0,613	0,195	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Butir 8	0,205	0,195	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid

Korelasi item-item pertanyaan terhadap variabel yang mempunyai nilai r_{item} lebih besar dari r_{tabel} merupakan item pertanyaan yang valid dalam menjelaskan variabelnya. Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa dari 8 item pertanyaan semuanya valid.

Tabel 3.

Hasil Uji Validitas Kuesioner Obyek Pajak				
Nomor Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan	Kesimpulan
Butir 1	0,703	0,195	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Butir 2	0,629	0,195	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Butir 3	0,786	0,195	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Butir 4	0,692	0,195	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Butir 5	0,601	0,195	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Butir 6	0,309	0,195	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Butir 7	0,634	0,195	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Butir 8	0,221	0,195	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid

Korelasi item-item pertanyaan terhadap variabel yang mempunyai nilai r_{item} lebih besar dari r_{tabel} merupakan item pertanyaan yang valid dalam menjelaskan variabelnya. Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa dari 8 item pertanyaan semuanya merupakan item pertanyaan yang valid.

Tabel 4.
Hasil Uji Validitas Kuesioner Fasilitasi

Nomor Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan	Kesimpulan
Butir 1	0,227	0,195	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Butir 2	0,670	0,195	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Butir 3	0,518	0,195	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Butir 4	0,745	0,195	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Butir 5	0,709	0,195	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Butir 6	0,766	0,195	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Butir 7	0,677	0,195	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
Butir 8	0,684	0,195	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid

Korelasi item-item pertanyaan terhadap variabel yang mempunyai nilai r_{item} lebih besar dari r_{tabel} merupakan item pertanyaan yang valid dalam menjelaskan variabelnya. Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa dari 8 item pertanyaan semua valid.

2. Uji Reliabilitas

Tabel 5
Hasil Uji Reliabilitas

Instrumen Penelitian	r_{alpha} <i>cronbaach</i>	Kriteria	Keterangan
Kuesioner Pelayanan aparatur	0,778	0,60	Reliabel
Kuesioner Wajib pajak	0,866	0,60	Reliabel
Kuesioner obyek pajak	0,839	0,60	Reliabel
Kuesioner fasilitasi	0,867	0,60	Reliabel
Kuesioner implementasi kebijakan	0,875		

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pengujian reliabilitas instrumen variabel Pelayanan, Akurasi Data Wajib Pajak, Akurasi Data Obyek Pajak, Fasilitasi, dan Implementasi Kebijakan menghasilkan nilai alpha Cronbach $> 0,6$ sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variable bersifat reliabel.

Analisis Hasil Estimasi

Model ini dimaksudkan untuk menganalisis pengaruh Pelayanan, Akurasi Data Wajib Pajak, Akurasi Data Obyek Pajak, Fasilitasi terhadap implementasi kebijakan pajak. Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil regresi sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
(constant)	9,135	4,555	2,005	0,006
Pelayanan	0,003	0,108	0,029	0,977
Wajib pajak	0,199	0,107	1,861	0,066
Obyek pajak	0,536	0,10	4,869	0,000
Fasilitasi	-0,004	0,071	-0,057	0,955

Dari hasil estimasi didapat model persamaan dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$Y = 9,125 + 0,003X_1 + 0,199X_2 + 0,536X_3 - 0,004 + e$$

Model tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- $\beta_1 = 0,003$ artinya jika pelayanan ditingkatkan 10 skor/satuan maka penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan akan ikut meningkat 0,03 skore / satuan dengan asumsi variabel wajib pajak, obyek pajak, fasilitasi dan implementasi kebijakan, dianggap konstan.
- $\beta_2 = 0,199$ artinya jika Wajib Pajak ditingkatkan 10 skor / satuan maka penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan akan ikut meningkat 1,99 skor / satuan dengan asumsi variabel Pelayanan, Obyek pajak, Implementasi Kebijakan, Fasilitasi dianggap konstan.
- $\beta_3 = 0,536$ artinya jika Obyek Pajak ditingkatkan 10 skor / satuan maka penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan tidak ikut berpengaruh.
- $\beta_4 = -0,004$ artinya jika fasilitasi ditingkatkan maka penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan tidak ikut berpengaruh.

Pengujian Asumsi

1. Uji Multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini.

Tabel 7
Hasil Uji Multikolinieritas

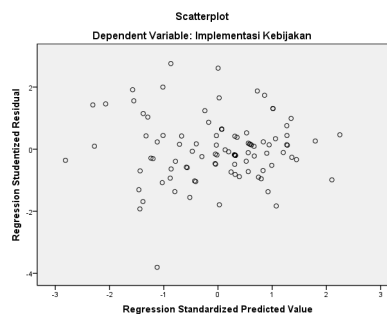
Variabel Bebas	Statistik Kolinearitas	
	Nilai Tolerance	Nilai VIF
Pelayanan	0,543	1,840
Wajib Pajak	0,531	1,883
Obyek Pajak	0,411	2,431
Implementasi Kebijakan	0,422	2,372
Fasilitas	0,736	1,358

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh hasil bahwa masing-masing variabel independen menghasilkan nilai *tolerance* > 0,01 dan nilai VIF < 10. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen yaitu pelayanan, wajib pajak, obyek pajak, implementasi kebijakan, fasilitas tidak saling berkorelasi linier atau tidak terjadi multikolinieritas pada model.

2. Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 8 berikut ini

Tabel 8
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan grafik scatterplots di atas terlihat titik-titik menyebar secara acak (random) baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y.

hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

3. Uji Autokolerasi

Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel 9 berikut ini.

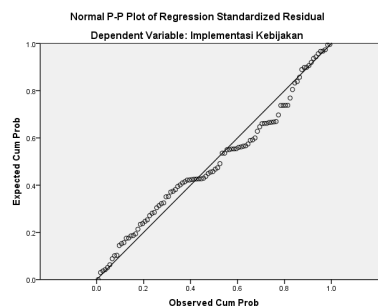
Tabel 9
Hasil Uji Durbin Watson

Variabel bebas	Variabel terikat	Hasil Uji Durbin Watson	Tabel Durbin Watson	
			d_L	d_U
Pelayanan Akurasi Data Wajib pajak Akurasi Data Obyek pajak Fasilitasi	Implementasi kebijakan	1,807	1,59	1,76

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat nilai Durbin-Watson sebesar 1,807 akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan derajat kepercayaan 5%, jumlah sampel 100 dan jumlah variabel bebas 5, maka di tabel Durbin-Watson akan didapat nilai d_L 1,59 dan d_U 1,76. Nilai DW 1,807 terletak di antara d_U dan $4d_U$ atau $1,59 < 1,807 < 2,24$ maka diterima. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada model regresi.

4. Uji Normalitas Data

Uji Normalitas data dilakukan untuk menguji apakah data terdistribusi secara normal. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi nilai residual normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas dalam penelitian ini dilakukan menggunakan alat uji P-Plot. Hasil uji normalitas dapat dilihat dalam gambar 1 berikut ini.



Gambar 1
Hasil Uji Normalitas dengan P-Plot

Berdasarkan grafik normal probability plots diatas terlihat titik-titik menyebar berhimpit di sekitar garis diagonal dan hal ini menunjukkan bahwa residual terdistribusi secara normal, dengan demikian variabel yang diuji sudah memenuhi uji asumsi normalitas yang disyaratkan.

Hasil Pengujian Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 10 di bawah ini.

Tabel 10
Uji Koefisien Determinasi

Variabel	R	R Square	<i>Adjusted R Square</i>
Pelayanan, wajib pajak, obyek pajak dan fasilitas terhadap implementasi kebijakan	0,685	0,469	0,447

Pada tabel tersebut di atas besarnya nilai Adjusted R^2 adalah 0,469 berarti variasi variabel implementasi kebijakan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Wonogiri dapat dijelaskan oleh variasi yang terjadi pada variabel pelayanan, wajib pajak, obyek pajak, dan fasilitasi secara serentak sebesar 44,7% sedangkan sisanya 55,3% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

2. Uji Koefisien Regresi (Uji-t)

Hasil uji signifikansi-t dalam penelitian ini sebagaimana pada tabel 11 di bawah ini.

Tabel 11
Uji Koefisien Regresi (Uji-t)

Variabel Bebas	Nilai t	Signifikansi
Pelayanan	0,029	0,977
Wajib Pajak	1,861	0,066
Obyek Pajak	4,869	0,000
Fasilitas	-0,057	0,955

Hasil pengujian statistik t pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa variabel pelayanan positif tidak signifikan terhadap implementasi kebijakan, variabel wajib pajak positif tidak signifikan terhadap implementasi kebijakan,

variable fasilitas negative tidak signifikan berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Sedangkan untuk variabel obyek pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi kebijakan.

3. Uji Signifikan-F (Uji F)

Hasil uji signifikansi-F pada tabel 12 di bawah ini.

Tabel 12
Uji Signifikan-F

Variabel	Nilai Fhitung	Ftabel	<i>P value</i>
Pelayanan, wajib pajak, obyek pajak dan fasilitas terhadap implementasi kebijakan	20,973	2,467	0,000

Berdasarkan hasil analisis regresi seperti pada Tabel di atas diperoleh nilai Fhitung = 20,973, signifikansi $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan secara bersama-sama variabel bebas (pelayanan, wajib pajak, obyek pajak, dan fasilitas) secara simultan (bersama-sama) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Wonogiri pada tingkat signifikan 5%.

Pembahasan

Penelitian tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Wonogiri, diketahui bahwa faktor pelayanan aparat pajak, faktor akurasi data subyek pajak, faktor akurasi data obyek pajak dan faktor fasilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi kebijakan pajak mineral bukan logam dan batuan di Wonogiri dengan hasil nilai uji Fhitung $20,973 > F_{tabel} 2,467$ dengan *p value* $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan berpengaruh terhadap besar kecilnya faktor pelayanan, subyek pajak, obyek pajak dan fasilitas. Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tentu harus diupayakan untuk selalu ditingkatkan dengan cara pembinaan dan sosialisasi terus menerus. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Nwaolisa (2010)

menunjukkan bahwa pendapatan yang berasal dari pajak umum tidak dapat terpenuhi. Hal ini disebabkan karena kurangnya kebijakan pajak Negara dalam pemungutan pajak. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pihak pemerintah perlu menerapkan sistem pajak yang sederhana (mudah dimengerti oleh semua lapisan masyarakat), tertentu (secara hukum dan administrasi harus konsisten) dan jelas.

Pelayanan tidak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi kebijakan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Wonogiri. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t dengan *p value* $0,977 > 0,05$. Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan perlu didukung dengan pelayanan aparatur penerima pajak. Dengan pelayanan yang baik, maka akan meningkatkan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan. Dari pengamatan lapangan yang dilakukan, pelayanan yang perlu ditingkatkan antara lain adalah metode penagihan pajak yang selama ini tidak dilakukan, utamanya terhadap wajib pajak di bagian hulu. Praktis pelayanan yang dilakukan saat ini adalah metode pelayanan pasif (menunggu wajib pajak datang ke kantor). Hasil penelitian didukung oleh penelitian (2012) bahwa dampak pelayanan pajak banyak menimbulkan keraguan pada khalayak ramai. Implementasi pelayanan pajak di Malaysia tentu saja untuk meningkatkan efisiensi pungutan sistem pajak. Seperti halnya dijadikan sebagai sumber utama pendapatan tidak langsung pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan responden menerima lebih sedikit menerima promosi dan informasi otoritas yang relevan. Banyak orang-orang yang tidak percaya pada pelayanan pajak yang diterapkan. Pemerintah mempromosikan pelayanan pajak dengan melalui media sehingga orang-orang siap menghadapi pengaruh pelayanan pajak. Secara umum, Malaysia perlu menerapkan pelayanan pajak masa depan sebagai suatu pendekatan alternatif untuk meningkatkan pendapatan pemerintah walaupun pada akhir langkah implementasi akan ada banyak penerimaan dan pengeluaran permasalahan operasional seperti pedagang dan konsumen.

Hasil uji t variabel akurasi Data Wajib Pajak positif tidak signifikan memiliki pengaruh terhadap implementasi kebijakan, dengan *p value* $0,066 >$

0,05. Dalam kenyataan di lapangan, data wajib pajak dapat dilihat dari pendataan yang telah dilakukan oleh dinas terkait, yaitu Dinas Pengairan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Wonogiri dalam buku Profil Investasi Pertambangan Kabupaten Wonogiri Tahun 2002. Secara logika apabila akurasi data wajib pajak meningkat, maka penagihan dapat dilaksanakan secara benardan akurat, sehingga penerimaan pajak akan meningkat. Namun demikian apabila tidak diimbangi dengan peningkatan faktor lain, misalnya pelayanan aparatur dan implementasi kebijakan maka akurasi Data Wajib Pajak tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap implementasi kebijakan pajak mineral bukan logam dan batuan. Hal ini sesuai dengan penelitian Abidin (2014) tentang “*Using Theory of Reasoned Action to Explain Taxpayer Intention to Comply with Goods and Services Tax*”, menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak terhadap pelaksanaan yang baik dan pajak jasa (GST) di Malaysia. Sikap dan norma subjektif berhubungan positif dengan niat perilaku. Persepsi wajib pajak yang baik terhadap kebijakan pajak yang diterapkan akan memberikan motivasi besar pada subyek dalam pembayaran pajak, sehingga hal ini dapat mendorong pula income pajak Negara.

Akurasi data obyek pajak sesuai dengan hasil uji t menunjukkan pengaruh positif dan signifikan, $p\ value\ 0,000 < 0,05$. Hal ini disebabkan bahwa data obyek pajak merupakan data yang berubah-ubah setiap saat karena merupakan data produksi. Akurasi data produksi mineral bukan logam dan batuan hanya akan didapatkan apabila laporan produksi yang diberikan oleh penambang maupun pemakai mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Yang saat ini terjadi adalah data produksi yang diterima belum sepenuhnya merupakan data produksi. Di samping itu pengawasan yang dilakukan pun belum dapat dikatakan baik. Dengan demikian faktor ini secara individu positif signifikan berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pajak oleh pemerintah Kabupaten Wonogiri saat ini dalam bentuk penyediaan perda telah mendukung peningkatan penerimaan pajak. Apabila tidak diimplementasikan maka kebijakan yang dibuat akan sia-sia dan penerimaan pajak tidak akan meningkat.

Hasil uji t menunjukkan bahwa dari uji t faktor fasilitasi negative tidak signifikan dengan *p value* $0,955 > 0,05$. Namun dari uji F secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan. Fasilitasi meliputi pembinaan usaha pertambangan, pengelolaan lingkungan pertambangan, penanganan pertambangan tanpa izin dan reklamasi lahan bekas tambang secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, mengingat kesadaran wajib pajak yang masih rendah, sehingga apabila tidak didukung oleh faktor yang lain, maka faktor fasilitasi ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap implementasi kebijakan.

Hasil regresi menunjukkan nilai adjusted R^2 sebesar 0,447. Hal ini berarti bahwa sekitar 44,7% variable implementasi kebijakan pajak mineral bukan logam dan batuan dapat dijelaskan oleh variable pelayanan aparatur, akurasi data wajib pajak, akurasi data obyek pajak, dan fasilitasi sedangkan sisanya sebesar 55,3% dijelaskan oleh variabel lain di luar variable penelitian. Hal ini membuka kesempatan bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian mengenai penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Wonogiri.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis data tentang pengaruh motivasi kerja, disiplin kerja dan komitmen karyawan terhadap prestasi kerja karyawan di RSUD Karanganyar, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Faktor pelayanan aparat pajak, faktor akurasi data subyek pajak, faktor akurasi data obyek pajak dan faktor fasilitasi secara simultan berpengaruh positif terhadap implementasi kebijakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Wonogiri, hal ini terbukti dengan hasil uji F diperoleh *p value* 0,000.
2. Faktor pelayanan aparat pajak tidak berpengaruh positif terhadap implementasi kebijakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Wonogiri, hal ini terbukti dengan hasil uji t diperoleh *p value* 0,977.

3. Faktor akurasi data subyek pajak tidak berpengaruh positif terhadap implementasi kebijakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Wonogiri, hal ini terbukti dengan hasil uji t diperoleh *p value* 0,066.
4. Faktor akurasi data obyek pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi kebijakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Wonogiri, hal ini terbukti dengan hasil uji t diperoleh *p value* 0,000.
5. Faktor fasilitasi tidak berpengaruh positif terhadap implementasi kebijakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Wonogiri, hal ini terbukti dengan hasil uji t diperoleh *p value* 0,955.
6. Pada Uji R², dimana dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh variable pelayanan, wajib pajak, obyek pajak dan fasilitas. Hasil regresi menunjukkan nilai adjusted R² sebesar 0,447. Hal ini berarti bahwa sekitar 44,7% variable implementasi kebijakan pajak dapat dijelaskan oleh variable pelayanan, wajib pajak, obyek pajak dan fasilitas sedangkan sisanya sebesar 55,3% dijelaskan oleh variable lain di luar variable penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S., 2002, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Bina Aksara.
- Aqualdo, Nobel, 2013, *Potensi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2007-2012*, Jurnal Ekonomi Volume 21, Nomor 3 September 2013.
- Brotodihardjo, Santoso, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Eresco: Bandung.
- Darise Nurlan, Drs, Ak, Msi, 2006, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Penerbit PT. Indeks.
- David Gichoya, 2005, *Factors Affecting the Successful Implementation of ICT Project in Government*, ISSN 1479-439X 175©Academic Conferences Ltd.

- Echekoba Felix Nwaolisa, 2010, *The Effect of Poor Implementation of Tax Policies on Developing Economies. A Studi of Nigerian Economy (1999-2010)*, Review of Public Administration and Management Vol. 2 No. 2
- Fitriani W,D & Adi Saputra, Putu Mahardika, 2009, *Analisa Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Batu)*, Journal of Indonesian Applied Economics, Vol 3 No 2, Oktober 2009, 135-149.
- Gujarati, I., 2001, *Ekonometrika Dasar*, Alih Bahasa Sumarno Zain, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Judisseno, R.K., 1997, *Perpajakan/Revisi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kabupaten Wonogiri, 2006, *Wonogiri Dalam Angka*, Penerbit Kantor Statistik Wonogiri.
- _____, 2006, *Inventarisasi Bahan Galian*, Dinas LHKP Kabupaten Wonogiri.
- _____, 1998, *Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak mineral bukan logam dan batuan.*
- _____, 1998, *Keputusan Bupati Kepala daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 19 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan.*
- _____, 1998, *Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 545/01/671/1998 Tentang Penetapan Harga Dasar Mineral Bukan Logam dan Batuan Di Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri*
- _____, 2000, *Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 1998.*
- _____, 2001, *Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri.*

- _____, 2007, *Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Wonogiri Tahun 2007*.
- Lundin, M., 2007, *When Does Cooperation Improve Public Policy Implementation?*, Policy Studies Journal, Academic Research Library.
- Mardiasmo, 2001, *Perpajakan*, Edisi ke Sembilan, Penerbit Andy, Yogyakarta.
- Mohd Rizal Palili, 2012, *The Impacts of Goods and Services Tax (GST) on Middle Income Earners in Malaysia*, School of Accounting Journal, Faculty of Economic and Management, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor, Malaysia.
- Munawir, S., 1992, *Perpajakan*, Cetakan Pertama, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- O'Leary, R., Rines, S.S., 2001, *Lessons Learned from Two Decades of Alternative Dispute Resolution Programs and Processes at the U.S. Environmental Protection Agency*, Public Administration Review, Academic Reseach Library.
- Republik Indonesia, 1945, *Undang-Undang Dasar 1945*.
- _____, 1967, *Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan*.
- _____, 1997, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- _____, 1999, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*.
- _____, 2009, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*.
- _____, 1980, *Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian*.
- Setiaji, B., 2006, *Metode Kuantitatif*, UMS, Surakarta.
- Soemitro, Rochmat, 1988, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung: Eresco.

Taiwo Makinde , 2005, *Problem of Policy Implementation in Developing Nations: The Nigerian Experience*, Kamla -raj 2005J. Soc.Sci. 11(1):63-69(2005).

Waluyo, W., 2002, *Perpajakan Indonesia* , Edisi Pertama, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Wikipedia Indonesia, 2008, *Pajak*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak>.

Zainol Bidin, 2014, “*Using Theory of Reasoned Action to Explain Taxpayer Intention to Comply with Goods and Services Tax*”, International Journal of Business and Social Science vol. 5, No. 5(1) April 2014.